

KERAGAAN RELATIF DAN KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANGKALAN

Jakfar Sadik

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: jakfarsadik@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the performance relative and characteristics development districts in Bangkalan. Methods of data analysis used in this study is schallogram analysis and geographic information systems. While the data used is PODES, 2013 and Bangkalan Dalam Angka, 2014. Figures Results of the analysis has been conducted on data Podes and Bangkalan Dalam Angka (BDA) where that 177 villages of the study sites included in the category of low development (hierarchy III), while the village entrance in the growing category (hierarchy I) only amounted to 35 villages, and the rest fall into the category hierarchy II. The village is located in the hierarchy I and II have the potential to service centers and growth centers in each district, because it has the type and number of the most complete supporting facilities.

Keywords: Relative Performance, Characteristics Developments

PENDAHULUAN

Perkembangan wilayah selalu bersesuaian dengan potensi yang dimilikinya. Perkembangan wilayah yang tidak terkendali, dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang timbul antara lain kesenjangan perkembangan wilayah yang tinggi, tidak optimumnya distribusi investasi, maupun ketidakmerataan pengembangan infrastruktur wilayah. Untuk itu diperlukan perangkat untuk mengarahkan perkembangan pembangunan dalam bentuk rencana tata ruang wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arahan kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimum (Supriyadi, 2013).

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar perimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Supriyadi, 2013).

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana,

menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Tjokroaminoto & Mustopadjaya, 1985)

Analisis fungsi wilayah, atau sering disebut juga dengan analisis fungsi, adalah analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah perencanaan, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut, dengan menggunakan slat analisis fungsi akan diketahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dengan distribusi penduduk di suatu daerah, sehingga akan diketahui penumpukan fasilitas pelayanan di wilayah-wilayah tertentu atau sudah tersebar secara merata, apakah fasilitas yang ada sudah sesuai dengan fungsinya atau belum. Fungsi di sini adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan (customer).

Ekonomi aglomerasi memiliki peran penting dalam pembangunan, banyaknya pelayanan dan konsentrasi kegiatan ekonomi merangsang informasi dan pertukaran. Spesialisasi ekonomi meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Akses yang baik terhadap pasar, sistem keuangan dan pasar tenaga kerja yang lebih luas, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan serta akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Jenssen, 1998).

Kabupaten Bangkalan sebagai wilayah yang berada di Propinsi Jawa Timur masih termasuk dalam kategori daerah yang tertinggal dibandingkan dengan wilayah yang ada kawasan Gerbangkertasusila. Sampai saat ini perekonomian Kabupaten Bangkalan di dominasi oleh sektor primer yang berbasis pada sumber daya alam, yaitu pertanian. Hal ini dapat dilihat dari distribusi prosentase PDRB tahun 2013 menunjukkan bahwa sektor pertanian memperoleh nilai tertinggi sebesar 31,62%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 29,09%. Sedangkan 7 (tujuh) sektor lainnya memberikan distribusi prosentase yang relatif kecil antara 0,77 – 13,84% (Bangkalan Dalam Angka 2014).

Besarnya distribusi sektor primer terhadap perekonomian Kabupaten Bangkalan disebabkan oleh besarnya nilai tambah yang diperoleh dari produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam (*Resource Base Oriented*), meskipun pada kenyataannya sumberdaya lahan yang ada relatif kurang subur.

Secara geografis Kabupaten Bangkalan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan wilayah lain di Madura, hal ini dikarenakan letaknya berdekatan dengan Kota Surabaya yang notabene merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Keunggulan yang dimiliki ditunjang dengan dibentuknya kalster pengembangan Jawa Timur yang diwujudkan dalam kawasan Gerbang kertasusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Inti dari konsep kawasan itu adalah pembangunan di sektor pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, dan pariwisata.

Wilayah Kabupaten Bangkalan secara administratif terbagi menjadi 18 kecamatan, dimana 8 diantara telah diarahkan untuk pengembangan kawasan industri dan jasa. Kawasan industri akan difokuskan pada wilayah Kecamatan

Labang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Tragah, Kecamatan Burneh, Kecamatan Kamal, Kecamatan Socah. Sedangkan kawasan jasa akan banyak difokuskan pada wilayah Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah (pelabuhan dan pergudangan), Kecamatan Tanjung Bumi (pelabuhan). Keberadaan kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan *multiplayer effect* terhadap kecamatan di sekitarnya, sehingga nantinya meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bangkalan.

Dalam proses Perencanaan Daerah, analisis fungsi merupakan alat yang efektif untuk melihat kerangka-kerangka umum seperti tersebut di atas, dan secara efektif dapat digunakan untuk melihat kegiatan ekonomi masyarakat pada lingkungan wilayah pembangunan, karena itu analisis keragaan reratif dan karakteristik perkembangan kecamatan di kabupaten bangkalan penting dilakukan untuk memudahkan para perencana untuk menentukan prioritas-prioritas yang mendorong masyarakat untuk memperoleh fasilitas pelayanan secara mudah.

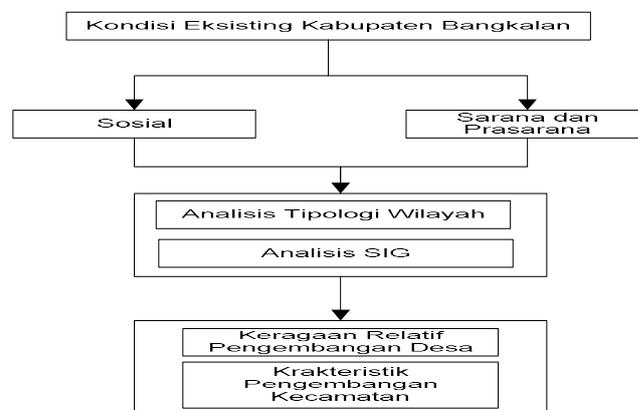
METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari pengolahan Sensus Potensi Data (PODES) yang dilakukan oleh BPS. Dalam PODES dikumpulkan informasi keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi: sarana dan prasarana wilayah serta potensi ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan masyarakat lainnya untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan daerah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder lainnya yang diperoleh melalui data yang dihimpun oleh instansi terkait meliputi: BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Bangkalan, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kabupaten Bangkalan serta hasil-hasil penelitian dan literatur yang dianggap relevan dengan studi ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis skalogram dan sistem informasi geografis. Tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara ringkas alur pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat dalam diagram alir penelitian pada Gambar 1.



Gambar 1
Alur pelaksanaan penelitian

Analisis Potensi Wilayah dengan Analisis Skalogram

Sesuai dengan tujuan pertama penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi dan arah pengembangan kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan, maka digunakanlah metode skalogram. Metode skalogram ini dapat digunakan untuk menentukan peringkat pemukiman atau wilayah dan kelembagaan atau fasilitas pelayanan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat menjadi pusat pelayanan. Berdasarkan analisis ini dapat ditentukan prioritas pengadaan sarana dan prasarana di setiap unit wilayah yang dianalisis. Indikator yang digunakan dalam analisis skalogram adalah jumlah penduduk, jenis dan jumlah unit serta kualitas fasilitas pelayanan yang dimiliki masing-masing Kecamatan.

Menurut Budiharsono (2001) metode ini mempunyai beberapa keunggulan, antara lain :

1. Memperlihatkan kaitan dasar antara jumlah penduduk dan tersedianya fasilitas pelayanan
2. Secara cepat dapat mengorganisasikan data dan mengenal wilayah
3. Membandingkan pemukiman-pemukiman dan wilayah-wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan
4. Memperlihatkan hierarki pemukiman atau wilayah
5. Secara potensial digunakan untuk perancangan dan pemantauan fasilitas baru

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis pusat pelayanan dengan metode skalogram adalah :

1. Setiap Kecamatan disusun urutannya berdasarkan peringkat jumlah penduduk
2. Kecamatan tersebut disusun urutannya berdasar pemilihan jumlah jenis fasilitas yang dimiliki
3. Fasilitas-fasilitas disusun urutannya berdasarkan jumlah wilayah yang memiliki jenis fasilitas tersebut
4. Peringkat jenis fasilitas disusun urutannya berdasar jumlah total unit fasilitas.

Menurut Priyanto (2010) disamping metode skalogram seperti demikian, terdapat juga metode lain yang merupakan modifikasi metode skalogram yang dikenal dengan penentuan Indeks Perkembangan Desa (IPD) yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam menghitung IPD, dilakukan dengan melakukan faktor koreksi untuk setiap data yang digunakan. Faktor koreksi antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah rumahtangga atau dilakukan rovers pada variabel tertentu.

Analisis skalogram ini didasarkan pada fasilitas yang dimiliki desa. Selanjutnya dilakukan standarisasi dengan nilai minimum dan nilai standar deviasinya. Model untuk menentukan nilai Indeks Perkembangan Desa (IPD) suatu wilayah atau pusat pelayanan adalah sebagai berikut:

$$IPD_j = \sum_i^n 1'_{ij}$$

Dimana IPD_j = Indeks Perkembangan Desa ke-j, $1'_{ij}$ = Nilai indikator perkembangan ke-i terkoreksi/terstandarisasi desa ke j, lij = Nilai indikator perkembangan ke-i desa ke j, li_{min} = Nilai indikator perkembangan ke-i terkecil, SD_i = Standar Deviasi indikator perkembangan ke-i

Selanjutnya pengurutan tingkat hierarki berdasarkan pengkumulatifan dari nilai indeks masing-masing desa. Urutan teratas merupakan tingkat hierarki terbesar, demikian seterusnya hingga urutan hierarki terkecil. Urutan hierarki

yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan selang hierarki dengan menggunakan rata-rata Indeks Perkembangan Desa (IPD) dan standar deviasi (Stdev). Adapun selang dari hierarki ini adalah sebagai berikut :

1. Hierarki I (Tingkat Hierarki Tinggi) : nilai indeks $> (2 \times \text{Stdev}) + \text{nilai rata-rata}$
2. Hierarki II (Tingkat Hierarki Sedang) : nilai indeks antara nilai rata-rata dengan $(2 \times \text{Stdev}) + \text{nilai rata-rata}$
3. Hierarki III (Tingkat Hierarki Rendah) : nilai indeks $< \text{nilai rata-rata}$

Adapun variabel yang digunakan dalam metode skalogram ini bersumber dari data PODES 2011 yang dilaksanakan oleh BPS. Variabel-variabel tersebut secara garis besar terdiri dari variabel: kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, jumlah dan akses terhadap sarana pendidikan dan keterampilan, jumlah dan akses terhadap sarana dan tenaga kesehatan, sosial budaya (jumlah tempat ibadah, jumlah dan akses terhadap sarana hiburan/olahraga) angkutan, komunikasi dan Informasi, penggunaan lahan, dan potensi perekonomian (jumlah industri, pertokoan, paw, warung, koperasi, bank). Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Variabel yang digunakan dalam analisis skalogram

| No | Uraian | Satuan |
|----|--|-----------|
| 1 | Jumlah Penduduk | Jiwa |
| 2 | Jumlah TK | Unit/Jiwa |
| 3 | Jumlah SD | Unit/Jiwa |
| 4 | Jumlah SLTP | Unit/Jiwa |
| 5 | Jumlah SLTA | Unit/Jiwa |
| 6 | Jumlah PT | Unit/Jiwa |
| 7 | Jumlah Rumah Sakit (Unit) | Unit/Jiwa |
| 8 | Jumlah Rumah Sakit Bersalin (Unit) | Unit/Jiwa |
| 9 | Jumlah Puskesmas (Unit) | Unit/Jiwa |
| 10 | Jumlah Tempat Praktek Dokter (Unit) | Unit/Jiwa |
| 11 | Jumlah Apotik (Unit) | Unit |
| 12 | Kios Sarana Produksi Pertanian | Unit |
| 13 | Industri dari kulit (unit) | Unit |
| 14 | Industri dari kayu (unit) | Unit |
| 15 | Industri logam mulia dan bahan dari logam (unit) | Unit |
| 16 | Industri anyaman (unit) | Unit |
| 17 | Industri dari gerabah/keramik/batu (unit) | Unit |
| 18 | Industri kain tenun (unit) | Unit |
| 19 | Industri makanan dan minuman (unit) | Unit |
| 20 | Industri lainnya (unit) | Unit |
| 21 | Super market/ pasar swalayan/toserba/mini market (unit) | Unit |
| 22 | Restoran/rumah makan (unit) | Unit |
| 23 | Toko/Warung kelontong (unit) | Unit |
| 24 | Hotel (unit) | Unit |
| 25 | Bank Umum (Kantor Pusat/Cabang/Capem) (unit) | Unit |
| 26 | Bank Perkreditan Rakyat (BPR Baru/PT. Bank Pasar/PT. Bank Desa/dsj) (unit) | Unit |
| 27 | Jumlah Koperasi (unit) | Unit |

| | | |
|----|--|------|
| 28 | Jumlah KUD (unit) | Unit |
| 29 | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (unit) | Unit |
| 30 | Jumlah Koperasi Non KUD lainnya (unit) | Unit |

Deskripsi dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis

Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran spasial secara lebih jelas dalam bentuk visualisasi (peta) mengenai beberapa hasil analisis tingkat perkembangan wilayah. Berdasarkan implikasinya, kegunaan model spasial yang digunakan adalah : (1) sebaran tingkat perkembangan wilayah; (2) analisis faktor kebijakan; dan (3) pembuatan dan perencanaan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Relatif dan Tingkat Perkembangan Kecamatan

Analisis skalogram merupakan salah satu analisis terhadap pemusatan dalam suatu wilayah. Dengan melakukan identifikasi terhadap fasilitas-fasilitas kunci yang mempunyai hierarki serta mencirikan suatu daerah berkembang, maka kemudian dapat ditentukan rangking desa di Kabupaten Bangkalan.

Wilayah diasumsikan dalam tipologi wilayah nodal, dimana pusat atau hinterland suatu wilayah dapat ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang ada. Kecamatan yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas yang secara relatif paling lengkap merupakan pusat dan akan mempunyai hierarki yang lebih tinggi. Sebaliknya jika satu wilayah mempunyai jumlah dan jenis fasilitas dengan kuantitas yang rendah merupakan wilayah hinterland dari wilayah lainnya (Pardede, 2004).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data fasilitas yang ada di Kabupaten Bangkalan, maka diperoleh informasi bahwa masih ditemukan desa yang tingkat perkembangan yang rendah di masing-masing kecamatan. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan yang dilakukan masih belum mampu menyentuh semua desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Informasi hierarki desa di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangkalan ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Hierarki Desa per Kecamatan di Kabupaten Bangkalan

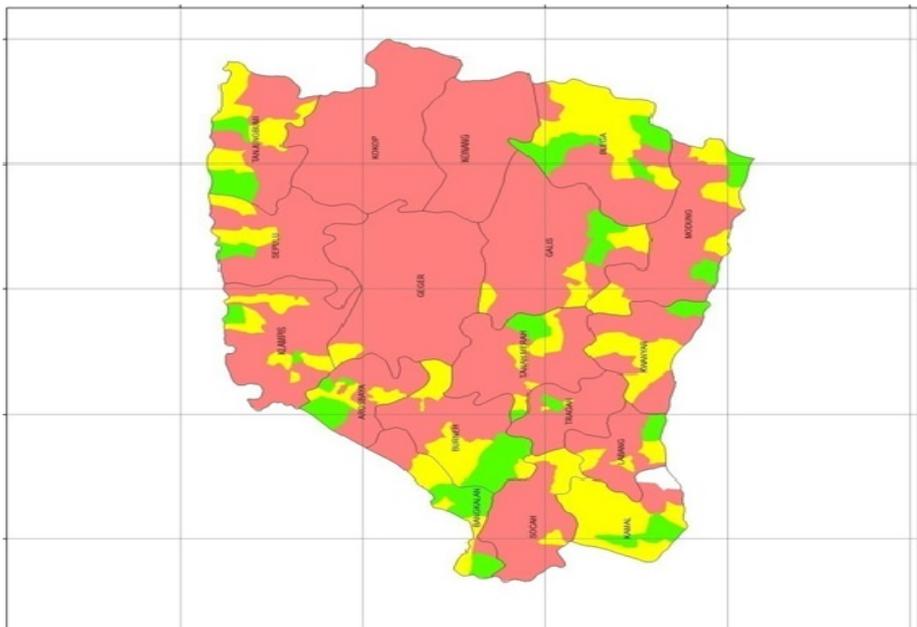
| No | Kecamatan | Hierarki I | Hierarki II | Hierarki III | Jumlah |
|----|-----------|------------|-------------|--------------|--------|
| 1 | Arosbaya | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 2 | Bangkalan | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 3 | Blega | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 4 | Burneh | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 5 | Galis | 2 | 4 | 15 | 21 |
| 6 | Geger | | 1 | 12 | 13 |
| 7 | Kamal | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 8 | Klampis | 3 | 6 | 13 | 22 |
| 9 | Kokop | | | 13 | 13 |
| 10 | Konang | | | 13 | 13 |
| 11 | Kwanyar | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 12 | Labang | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 13 | Modung | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 14 | Sepulu | 1 | 3 | 11 | 15 |

| | | | | | |
|----|-------------|----|----|-----|-----|
| 15 | Socah | | 2 | 9 | 11 |
| 16 | Tanah merah | 2 | 5 | 16 | 23 |
| 17 | Tanjungbumi | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 18 | Tragah | 1 | 2 | 15 | 18 |
| | Jumlah | 35 | 69 | 177 | 281 |

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan informasi yang tersaji pada Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa desa di lokasi penelitian menunjukkan kategori perkembangan rendah, hal dapat dilihat dari jumlah desa hierarki III berjumlah 177 desa, sedangkan desa yang masuk dalam kategori berkembang (hierarki I) hanya berjumlah 35 desa, dan sisanya masuk dalam kategori hierarki II. Desa yang berada pada hierarki I dan II mempunyai potensi untuk pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan di masing-masing kecamatan, karena mempunyai jenis dan jumlah fasilitas pendukung yang paling lengkap.

Besarnya jumlah desa yang tidak berkembang di Kabupaten Bangkalan dapat diartikan bahwa 18 kecamatan yang ada memiliki keragaan relatif tingkat perkembangannya masih sangat di dominasi oleh kecamatan dengan nilai indeks < nilai rata-rata, atau wilayah terbelakang dan kelompok wilayah ini lebih dicirikan dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana sangat terbatas.



Gambar 2
Peta Hierarki Desa Kabupaten Bangkalan

Keterangan gambar:



Kecamatan Kamal

Hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data fasilitas yang dilakukan di Kecamatan Kamal maka kemudian dapat diperoleh informasi bahwa desa-desa yang ada dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hierarki. Indeks perkembangan desa yang ada di Kecamatan Kamal ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Indek Pengembangan Desa di Kecamatan Kamal

| No | Desa | Jumlah Penduduk | Indek Pengembangan Desa | Hierarki Wilayah |
|----|--------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 1 | Tajungan | 2323 | 23,36 | Hierarki II |
| 2 | Gili barat | 1539 | 15,64 | Hierarki II |
| 3 | Banyu ajuh | 14411 | 29,05 | Hierarki I |
| 4 | Kamal | 8200 | 22,63 | Hierarki II |
| 5 | Tanjung jati | 2567 | 24,56 | Hierarki II |
| 6 | Kebun | 3961 | 11,91 | Hierarki III |
| 7 | Gili timur | 3905 | 22,42 | Hierarki II |
| 8 | Gili anyar | 3072 | 25,56 | Hierarki I |
| 9 | Telang | 4358 | 24,03 | Hierarki II |
| 10 | Pendabah | 3622 | 22,08 | Hierarki II |

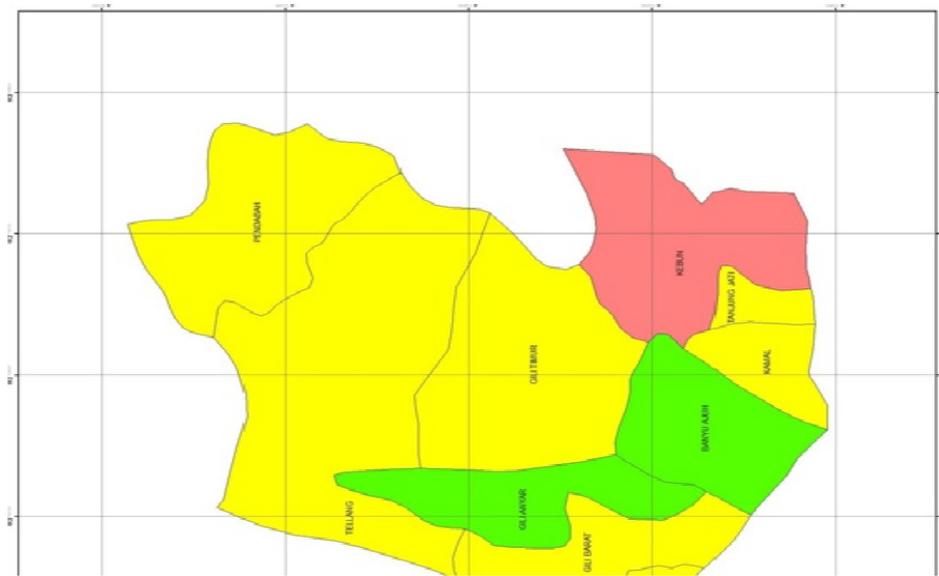
Sumber : Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa pola penyebaran desa berdasarkan indek pengembangan desa umumnya berada pada kategori perkembangan sedang (hierarki II), kemudian diikuti kategori maju (hierarki I), dan kategori rendah (hierarki III). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa di Kecamatan Kamal masih ditemukan desa yang memiliki akses yang terbatas terhadap pusat pelayanan, hal ditunjang dengan jumlah sarana prasarana yang sedikit.

Wilayah dengan tingkat pengembangan maju dicirikan dengan indek pengembangan desa paling tinggi dan ditentukan oleh jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi, jarak masing-masing wilayah terhadap pusat pelayanan relatif dekat, akses pelayanan lebih mudah, serta infrastruktur yang tersedia di masing-masing wilayah. Desa yang masuk dalam kategori maju adalah Desa Banyuajuh dan Desa Gili Anyar.

Wilayah dengan tingkat pengembangan sedang umumnya memiliki sarana dan prasarana yang tersedia lebih sedikit dengan jarak masing-masing wilayah terhadap pusat-pusat pelayanan agak lebih jauh dari hierarki I. Desa yang masuk pada kategori sedang adalah Desa Tajungan, Desa Gili Barat, Desa Kamal, Desa Tanjung Jati, Desa Gili Timur, Desa Pendabah dan Desa Telang.

Wilayah dengan tingkat pengembangan rendah yang ada di Kecamatan Kamal adalah Desa Kebun. Keberadaan Desa Kebun pada hierarki III tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia di desa tersebut relatif sangat kurang dan jarak dari desa terhadap pusat-pusat pelayanan relatif lebih sulit. Informasi sebaran hierarki desa yang ada di Kecamatan Kamal dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3
Peta Hierarki Desa Kecamatan Kamal

Keterangan gambar:



Kecamatan Labang

Hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data fasilitas yang dilakukan di Kecamatan Labang menunjukkan bahwa bahwa desa-desa yang ada dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hierarki. Umumnya desa yang ada masuk dalam kategori desa dengan tingkat perkembangan rendah (hierarki III) dengan jumlah 9 desa, sedangkan wilayah yang termasuk dalam kategori maju (hierarki I) hanya 1 desa, dan wilayah yang masuk kategori sedang (hierarki II) berjumlah 3 desa. Indeks perkembangan desa yang ada di Kecamatan Labang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Indek Pengembangan Desa di Kecamatan Labang

| No | Desa | Jumlah Penduduk | Indek Pengembangan Desa | Hierarki Wilayah |
|----|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 1 | Kesek | 2785 | 12,61 | Hierarki III |
| 2 | Pangpong | 2616 | 15,02 | Hierarki III |
| 3 | Sukolilo barat | 6249 | 18,81 | Hierarki II |
| 4 | Sukolilo timur | 2476 | 43,03 | Hierarki I |
| 5 | Bunajih | 2403 | 10,48 | Hierarki III |
| 6 | Bringin | 2084 | 10,46 | Hierarki III |
| 7 | Ba'engas | 3401 | 13,48 | Hierarki III |
| 8 | Morkepek | 1338 | 13,00 | Hierarki III |
| 9 | Labang | 1976 | 23,54 | Hierarki II |
| 10 | Jukong | 3037 | 15,14 | Hierarki III |

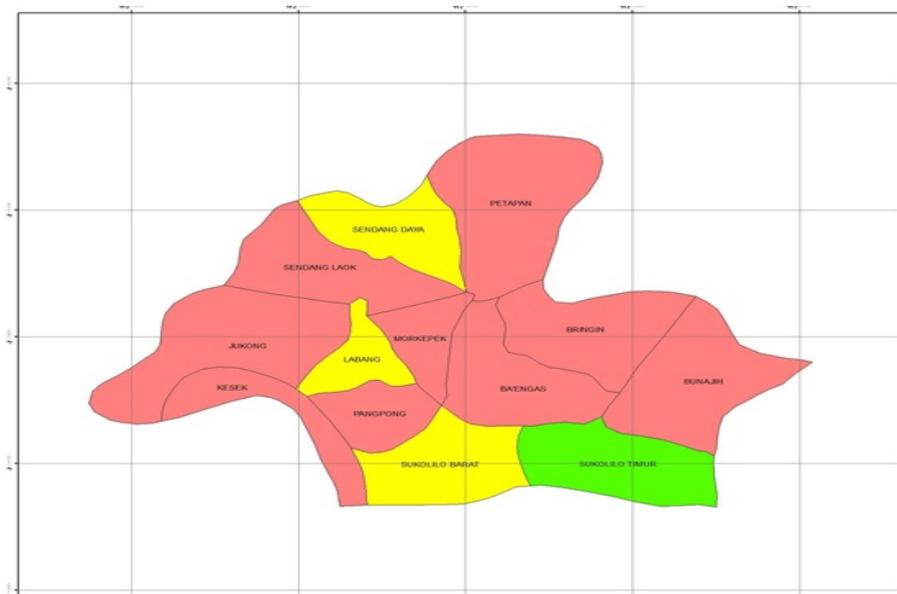
| | | | | |
|----|---------------|------|-------|--------------|
| 11 | Sendang laok | 1152 | 12,29 | Hierarki III |
| 12 | Sendang dajah | 2134 | 22,18 | Hierarki II |
| 13 | Petapan | 1671 | 10,85 | Hierarki III |

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan Tabel 4 yang telah ditunjukkan di atas diperoleh informasi bahwa desa yang masuk dalam kategori maju adalah Desa Sukolilo Timur, hal ini dapat diartikan bahwa desa tersebut memiliki indek pengembangan desa paling tinggi. Disamping itu, desa ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dengan jarak masing-masing wilayah terhadap pusat pelayanan relatif dekat dengan akses pelayanan lebih mudah.

Desa dengan indek pengembangan desa sedang adalah Desa Sukolilo barat, Desa Labang, dan Desa Sendang Dajah. Hal ini dapat diartikan bahwa desa yang masuk dalam kategori ini memiliki sarana dan prasarana yang tersedia lebih sedikit dengan jarak masing-masing wilayah terhadap pusat-pusat pelayanan agak lebih jauh dari hierarki I.

Sedangkan desa yang memiliki indek pengembangan rendah atau desa kurang maju yang ada di Kecamatan Labang adalah Desa Kesek, Desa Pongpong, Desa Bunajih, Desa Bringin, Desa Baengas, Desa Morkepek, Desa Jukong, Desa Sendang Laok dan Desa Patapan. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa sarana dan prasarana yang ada di desa-desa tersebut relatif sangat kurang dengan jarak desa ke pusat pelayanan relatif lebih sulit. Sehingga masyarakat yang ada di desa tersebut memiliki akses yang terbatas terhadap pusat pelayanan. Informasi sebaran hierarki desa yang ada di Kecamatan Labang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4
Peta Hierarki Desa Kecamatan Labang

Keterangan gambar:



Kecamatan Kwanyar

Hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data fasilitas di Kecamatan Kwanyar menunjukkan bahwa desa-desa yang ada dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hierarki. Desa dengan kategori kurang (hierarki III) memiliki jumlah paling banyak yaitu 10 desa, kemudian diikuti hierarki II (5 desa), dan hierarki I (1 desa). Indeks perkembangan desa yang ada di Kecamatan Kwanyar ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5
Indek Pengembangan Desa di Kecamatan Kwanyar

| No | Desa | Jumlah Penduduk | Indek Pengembangan Desa | Hierarki Wilayah |
|----|---------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 1 | Tebul | 1787 | 12,64 | Hierarki III |
| 2 | Kwanyar barat | 3979 | 12,17 | Hierarki III |
| 3 | Pasangrahan | 4362 | 20,38 | Hierarki II |
| 4 | Karanganyar | 2211 | 13,53 | Hierarki III |
| 5 | Batah barat | 2455 | 12,20 | Hierarki III |
| 6 | Batah timur | 2978 | 25,63 | Hierarki I |
| 7 | Duwek buter | 1803 | 9,15 | Hierarki III |
| 8 | Pandanan | 1243 | 12,23 | Hierarki III |
| 9 | Karang entang | 1165 | 12,31 | Hierarki III |
| 10 | Janteh | 1711 | 15,45 | Hierarki II |
| 11 | Dlemer | 2078 | 18,29 | Hierarki II |
| 12 | Ketentang | 3839 | 20,81 | Hierarki II |
| 13 | Morombuh | 4008 | 12,05 | Hierarki III |
| 14 | Sumur kuning | 3289 | 16,14 | Hierarki II |
| 15 | Paoran | 1165 | 10,37 | Hierarki III |
| 16 | Gunung sereng | 4137 | 10,41 | Hierarki III |

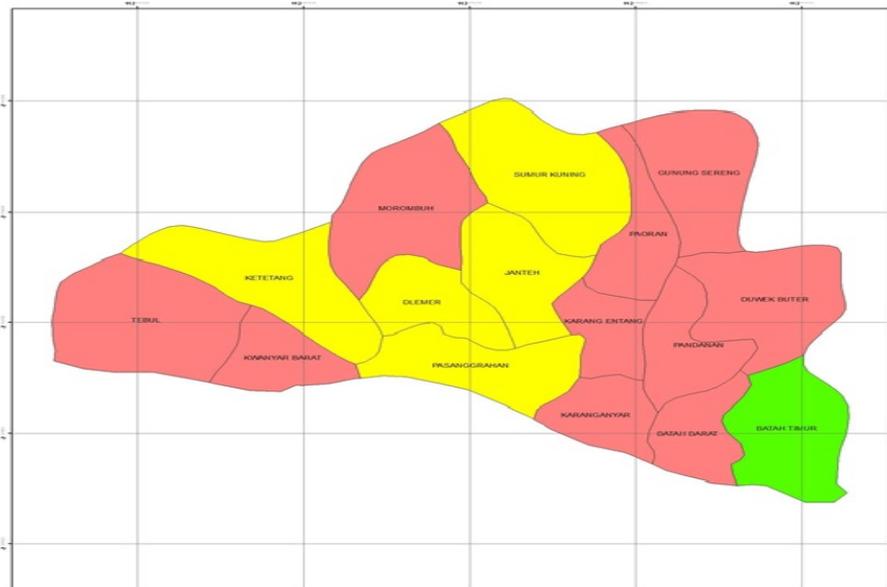
Sumber : Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan hasil indeks pengembangan desa sebagaimana telah ditunjukkan pada Tabel 5 di atas diperoleh informasi bahwa umumnya desa yang ada di Kecamatan Kwanyar memiliki akses yang terbatas terhadap pusat pelayanan, hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah desa termasuk dalam desa dengan tingkat perkembangan yang rendah atau kurang maju.

Desa yang masuk dalam kategori maju memiliki indeks pengembangan desa yang tinggi yang ditunjang dengan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan jarak desa terhadap pusat pelayanan relatif dekat. Dengan keberadaan sarana dan prasarana yang ada maka masyarakat yang ada di desa ini memiliki akses pelayanan lebih mudah terhadap pusat pelayanan. Desa yang masuk dalam kategori maju di Kecamatan Kwanyar adalah Desa Batah Timur.

Kecamatan Kwanyar juga memiliki desa dengan tingkat perkembangan sedang, dimana desa-desa yang termasuk dalam kategori ini umumnya memiliki sarana dan prasarana yang tersedia lebih sedikit dengan jarak yang agak jauh terhadap pusat-pusat pelayanan. Desa yang masuk pada kategori sedang adalah Desa Pasangrahan, Desa Janteh, Desa Dlemer, Desa Ketentang dan Desa Sumur Kuning. Sedangkan desa yang termasuk dalam kategori rendah atau tidak maju adalah Desa Tebul, Desa Kwanyar Barat, Desa Karang Anyar,

Desa Betah Barat, Desa Duwek Buter, Desa Pandanan, Desa Karang Entang, Desa Morombuh, Desa Paoran dan Desa Gunung Sereng. Desa yang termasuk dalam kategori ini umumnya memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pusat pelayanan, dan keberadaan sarana dan prasarana yang ada tidak memadai. Informasi sebaran hierarki desa yang ada di Kecamatan Kwanyar ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5
Peta Hierarki Desa Kecamatan Kwanyar

Keterangan gambar:



Kecamatan Socah

Hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data fasilitas di Kecamatan Socah menunjukkan bahwa desa-desa yang ada dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) hierarki. Desa dengan kategori kurang (hierarki III) memiliki jumlah paling banyak yaitu 9 desa, kemudian diikuti hierarki II (2 desa), Indeks perkembangan desa yang ada di Kecamatan Kwanyar ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6
Indek Pengembangan Desa di Kecamatan Socah

| No | Desa | Jumlah Penduduk | Indeks Pengembangan Desa | Hierarki Wilayah |
|----|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Junganyar | 2769 | 13,71 | Hierarki III |
| 2 | Socah | 5829 | 21,04 | Hierarki II |
| 3 | Buluh | 4038 | 8,71 | Hierarki III |
| 4 | Jaddih | 9779 | 11,29 | Hierarki III |
| 5 | Sanggra agung | 5524 | 23,40 | Hierarki II |
| 6 | Parseh | 6484 | 8,94 | Hierarki III |

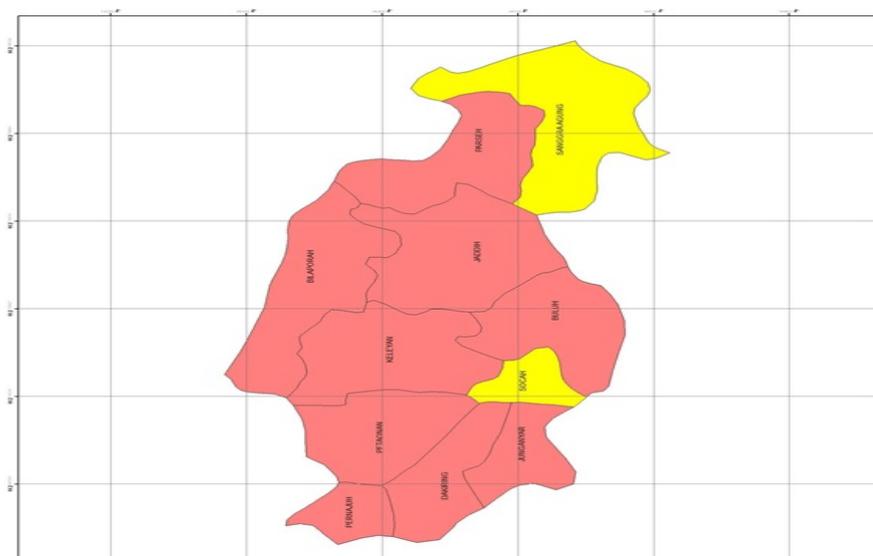
| | | | | |
|----|-----------|------|-------|--------------|
| 7 | Bilaporah | 5537 | 8,53 | Hierarki III |
| 8 | Keleyan | 7222 | 9,43 | Hierarki III |
| 9 | Petaonan | 2821 | 9,71 | Hierarki III |
| 10 | Dakiring | 2493 | 8,45 | Hierarki III |
| 11 | Pernajuh | 1002 | 10,28 | Hierarki III |

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan hasil indek pengembangan desa sebagaimana telah ditunjukkan pada Tabel 6 diatas diperoleh informasi bahwa umumnya desa yang ada di Kecamatan Socah memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pusat pelayanan, hal ini dapat dilihat dari dengan tidak adanya (hierarki I) yang menandakan bahwa sebuah desa dapat di katagorikan maju.

Desa yang masuk dalam kategori maju memiliki indek pengembangan desa yang tinggi yang ditunjang dengan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan jarak desa terhadap pusat pelayanan relatif dekat. Dengan keberadaan sarana dan prasarana yang ada maka masyarakat yang ada di desa ini memiliki akses pelayanan lebih mudah terhadap pusat pelayanan.

Kecamatan Socah juga memiliki desa dengan tingkat perkembangan sedang, dimana desa-desa yang termasuk dalam kategori ini umumnya memiliki sarana dan prasarana yang tersedia lebih sedikit dengan jarak yang agak jauh terhadap pusat-pusat pelayanan. Desa yang masuk pada kategori sedang adalah Desa Socah dan Desa Sangra Agung. Sedangkan desa yang termasuk dalam kategori rendah atau tidak maju adalah Desa Desa Junganyar, Desa Buluh, Desa Jaddih, Desa Parseh, Desa Bilaporah, Desa Keleyan, Desa Petaonan, Desa Dakiring dan Desa Pernajuh. Desa yang termasuk dalam kategori ini umumnya memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pusat pelayanan, dan keberadaan sarana dan prasarana yang ada tidak memadai. Informasi sebaran hierarki desa yang ada di Kecamatan Socah ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6
Peta Hierarki Desa Kecamatan Socah

Keterangan gambar:



PENUTUP

Berdasarkan analisis keragaan relatif dan karakteristik perkembangan kecamatan yang ada di kabupaten bangkalan menunjukkan bahwa secara umum dari jumlah keseluruhan Kecamatan dan desa yang ada di kabupaten Bangkalan memiliki tingkat perkembangan yang masih rendah atau masih belum berkembang.

Berdasarkan analisis keragaan relatif dengan skalogram diketahui perkembangan kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu;

- a) Hierarki I : Akses terhadap pusat pemerintahan baik, jumlah dan akses terhadap sarana pendidikan dan kesehatan baik, Tingkat kesejahteraan penduduk baik, sarana Perekonomian baik dan memadai, Kualitas lingkungan baik, dan partisipasi masyarakat baik. Hierarki ini memiliki tingkat perkembangan yang baik dan memadai.
- b) Hierarki II : Akses terhadap pusat pemerintahan cukup, jumlah dan akses terhadap sarana pendidikan dan kesehatan cukup, Tingkat kesejahteraan penduduk cukup, sarana Perekonomian cukup Memadai, Kualitas lingkungan cukup, dan partisipasi masyarakat cukup. Hierarki ini memiliki tingkat perkembangan yang cukup dan memadai.
- c) Hierarki III : Akses terhadap pusat pemerintahan kurang, jumlah dan akses terhadap sarana pendidikan dan kesehatan kurang, Tingkat kesejahteraan penduduk kurang, sarana Perekonomian kurang dan tidak memadai, Kualitas lingkungan kurang, dan partisipasi masyarakat kurang. Hierarki ini memiliki tingkat perkembangan yang kurang maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangkalan. 2014. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan 2013-2018*.
- BPS Kabupaten Bangkalan. 2014. *Data Potensi Desa Kabupaten Bangkalan Dalam Tahun 2014*.
- BPS Kabupaten Bangkalan. 2014. *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka Tahun 2014*.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dikun, Suyono. 2003. *Infrastruktur Indonesia: Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*. Jakarta : Kementerian Negara PPN/BAPPENAS
- Priyanto, D. A. 2010. Analisis Pengembangan Desa-Desa Pantai Bagi Pengelolaan Konflik Penangkapan Ale-Ale (*Meretrix Spp*) Di Perairan Ketapang Kalimantan Barat. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Rustiadi, E. 2001. *Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (ICZM). DKP.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: LPFE-UI.
- Supriyadi, D. 2013. Analisis Potensi dan Arah Pengembangan Desa Pesisir di Kabupaten Batu Bara. Universitas Sumatera Utara
- Ventina, R., K. Mahalli. 2006. *Perencanaan Wilayah Pesisir Sebagai Dampak Proyek Marine dan Coastal Resources Management project (MCRMP)*. Perencanaan dan Perubahan Bangsa di Masa yang akan Datang. Medan: Pustaka Bangsa Perss.